TRIBUN JABAR
RUBRIK TRIBUN BIZ
Rabu, 8 Februari 2012
Halaman 3

32

LKM untuk Hindari Rentenir

JATINANGOR,TRIBUN-Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM), seperti BPR, Kosipa, Usaha Simpan Pinjam, atau Baitul Maal, merupakan solusi tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa hingga kecamatan. Dengan LKM ini, masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi skala mikro dapat terbantu di tengah sulitnya akses modal pada bank konvensional.

"Usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat ini dipandang belum *bankable* serta berisiko tinggi. Maka dari itu, keberadaan LKM mampu menjawab masalah tersebut jika disertai *coverage* asuransi untuk mereka," ujar Heri Nugraha, dosen ekonomi Ikopin dalam seminar nasional "Prospek Pengembangan Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia" di Kampus Ikopin, Jatinangor (7/2).

Diakuinya, UMKM memang berisiko tinggi. Namun, hal itu perlu dilihat dari siapa yang menerima kredit ini. Jika masyarakat yang tidak memiliki kegiatan ekonomi, tentunya ini bermasalah. Namun berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi.

> "Usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat ini dipandang belum *bankable* serta berisiko tinggi."
>
> HERI NUGRAHA, Dosen Ekonomi Ikopin

"Memang berisiko. Namun, risiko tersebut bisa diminimalisir dengan di *backup* asuransi oleh pemerintah. Jika LKM ini diasuransikan, tentunya resiko besar tidak akan terjadi," jelasnya.

Adapun LKM ini, kata Heri, saat ini marak di Majalengka. Bunga yang ditawarkan sendiri hingga 16 persen. "LKM ini untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir," ujarnya.

Bagusnya lagi, imbuh Heri, LKM ini menyalurkan kredit berasal dari dana simpanan atau tabungan. Adapun saat ini, kredit yang disalurkan oleh LKM berasal dari dana pihak ketiga atau dari perbankan. "Jika kredit yang disalurkan LKM dananya berasal dari dana simpanan atau tabungan, paling tidak semangat koperasi bisa dijalankan," katanya.

Pembicara lain, Presiden Direktur Bank Ganesha, Abdul Salam, mengatakan peran LKM ini mampu memotong lingkaran setan kemiskinan. "Penyerapan kredit mikro itu dominan berada di level daerah seperti desa hingga kecamatan. Penyerap kreditnya sendiri masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi kecil dan rentan dengan kemiskinan. Jika LKM ini menyalurkan kredit pada mereka, saya yakin, kemiskinan yang selalu didominasi masyarakat pinggiran akan berkurang," kata Abdul.

Pada akhir Januari lalu di DPR, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan, LKM seperti lumbung desa, tercatat mencapai 600.000 unit di Indonesia. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusulkan adanya rancangan undang-undang LKM.

Menurut Agus, pengaturan LKM telah tercantum dalam UU Perbankan pasal 58, tapi pengaturan tentang LKM belum bisa dipraktikkan. Hal yang sudah bisa diselesaikan yakni penyelenggaraan bank komersial dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Dikatakan Agus, dalam UU tersebut lembaga-lembaga seperti lumbung desa, harus bisa diubah menjadi BPR dalam waktu tertentu. Namun berubahnya LKM menjadi BPR belum bisa dilakukan dalam waktu tertentu itu.

Alih-alih berubah, LKM justru menunjukkan prestasi yang kurang baik pada tahun 1990 -an. Alhasil kini banyak LKM yang menjadi ragu untuk berubah jadi BPR. "Tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh didiamkan, karena aktivitas penghimpunan dana masyarakat itu harus diatur," ujar Agus.**(ee/kompas.com)**